

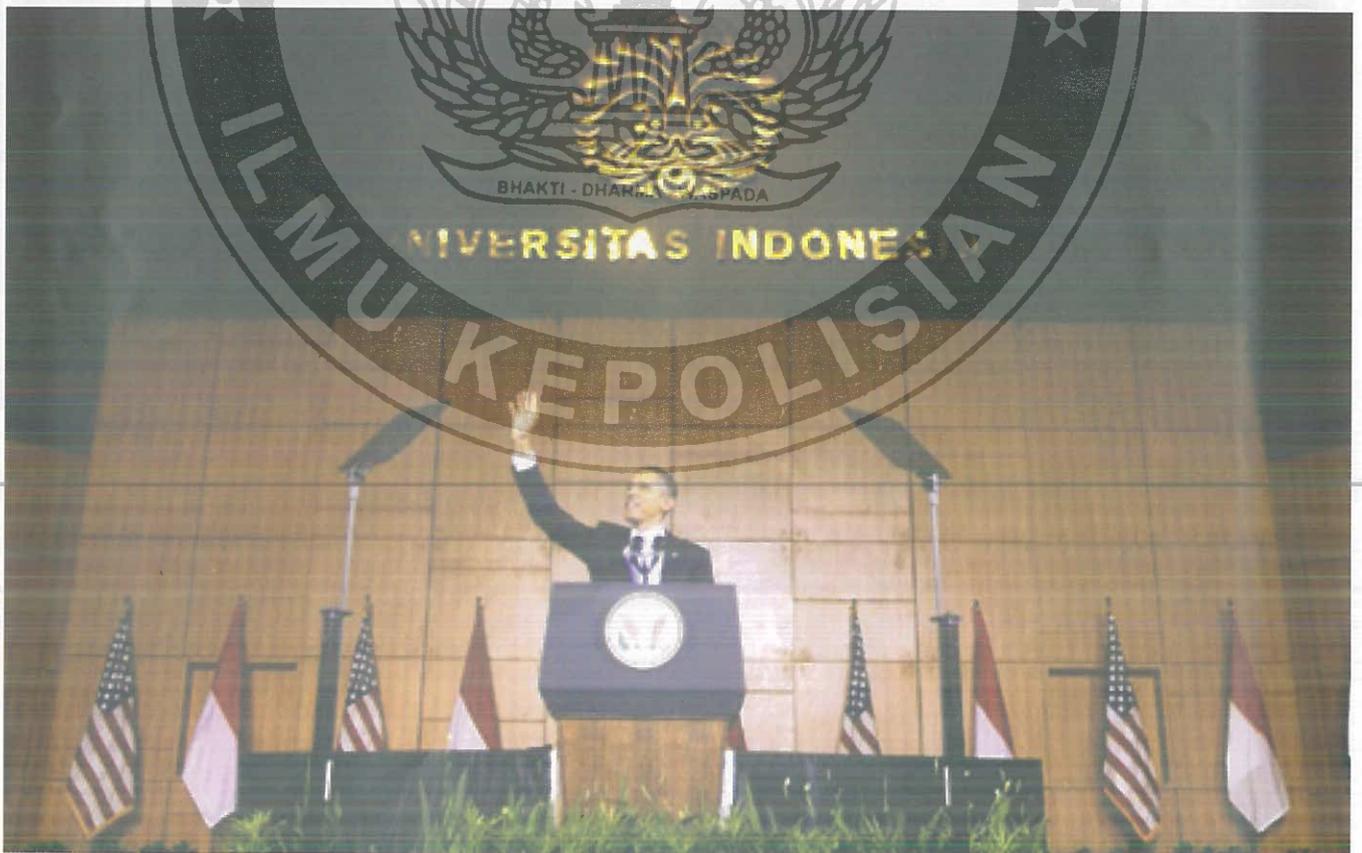
KITA SUDAH PUNYA PANCASILA HEBAT, TAK PERLU TENGOK KIRI KANAN

Sudah sebulan lebih Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, sejak kunjungannya pada November lalu ke Indonesia, kembali ke negaranya. Selepas kepulangannya, sejumlah forum diskusi pun digelar khusus untuk membahas kunjungan pemimpin negara adidaya itu -- dan nyaris semuanya berlangsung live di layar kaca.

TOPIKNYA pun nyaris seragam : Apa makna kunjungan Obama bagi Bangsa Indonesia? Seberapa pentingnya? Positif atau negatifkah arti kunjungan itu? Penting atau tidaknya dan positif atau negatifnya arti kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia adalah sangat tergantung kepada Bangsa Indonesia sendiri, terutama para pemimpinnya.

Dalam percakapannya dengan Jagratara, di Jakarta, Kamis (25/11), pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan pemerintah, bangsa

dan rakyat Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum yang sangat baik terkait dengan kedatangan Presiden AS tersebut. Apalagi presiden negara adidaya tersebut telah menawarkan kemitraan komprehensif yang meliputi kerjasama yang mendalam dalam berbagai bidang termasuk perekonomian, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup. "Yang jadi masalah sekarang, mampu tidak pemerintah kita dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanfaatkan momentum tersebut. Mumpung Barack Obama masih menjadi Presiden Amerika Serikat. Kalau tidak mampu, ya lewat begitu





saja. Dan kalau itu yang terjadi sangat disayangkan," ujar Arbi Sanit.

Menurut Arbi Sanit kemitraan komprehensif yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan renegotiasi kontrak kerja PT Freeport dan beberapa perusahaan tambang minyak milik Amerika Serikat yang dinilai selama ini merugikan rakyat Indonesia. "Tapi saya yakin pejabat kita yang berwenang untuk itu, tidak akan berani melakukan. Karena, kalau hal itu dilakukan mereka tidak mendapat komisi," kata Arbi Sanit.

Menyinggung kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, Arbi Sanit mengatakan jangan hanya terbatas untuk memerangi teroris. Tapi harus ditingkatkan lagi lebih jauh yaitu dikaitkan dengan pengembangan penganut agama yang modern dan moderat. Penganut agama yang radikal yang tidak dapat menghormati penganut agama lainnya harus dsingkirkan dan dikikis habis.

Arbi menambahkan bantuan pesawat F-16 dan peralatan persenjataan lainnya sebaiknya diterima saja. Karena negara memang membutuhkan bantuan itu. Lagi pula dana pemerintah

untuk alutsita TNI memang sangat terbatas. Soal embargo suku cadang pesawat F-16 dan peralatan senjata lain beberapa waktu silam, sehingga TNI kelimpungan, itu karena kesalahan kita sendiri. Kita tahu AS itu salah satu negara di dunia ini yang sangat menjunjung nilai HAM (Hak Asasi Manusia). Wajar kalau mereka kemudian meng-embargo suku cadang bantuan pesawat atau senjata yang mereka berikan. Karena itu, kita harus mengawasi secara ketat agar bantuan atau hibah pesawat F-16 dan alat persenjataan tidak digunakan aparat kita untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM.

Arbi Sanit juga mengatakan banyak manfaat yang dapat diambil bangsa Indonesia dari kunjungan Obama tersebut, walau kunjungan mantan anak Menteng Dalam itu sangat pendek, kurang dari 24 jam. Pertama, Obama menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat baik. Kedua, negara Indonesia dan AS dapat menjalin hubungan kemitraan komprehensif yang mendalam dalam berbagai bidang seperti perekonomian, politik, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Ketiga, Obama memberikan contoh atau tindakan yang

baik bagi pemimpin dan kaum intelektual kita dalam menjalankan demokrasi yang senjati. Obama juga mengajarkan kepada pemimpin kita agar tidak rakus, mabuk kekuasaan, takut kehilangan popularitas, mementingkan diri atau kelompoknya, peragu, dan selalu mementingkan citra bukan substansi.

"Poin ketiga itu yang terpenting bagi rakyat dan bangsa Indonesia," ujar Arbi Sanit seraya menambahkan karena itu banyak orang terkesima dan kagum, ketika Obama memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) sebelum bertolak ke Korea Selatan. Sebelum tampil memukau di depan tak kurang dari 6000 orang di perguruan tinggi UI, Obama juga berkesempatan mengunjungi mesjid kebanggaan Bangsa Indonesia Istiqlal.

Nah yang menjadi pertanyaan kita sekarang, sudah sebulan sejak kepulangannya, action apa yang dilakukan bangsa Indonesia yang menandai bahwa kunjungan presiden kulit hitam pertama AS itu bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan? Sepertinya belum kelihatan.

BUKAN SEKEDAR NOSTALGIA

Pengamat politik dari ICMI
(Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia) Dr Marwah Daud Ibrahim, seperti halnya Arbi Sanit mengatakan, bermanfaat atau tidak bagi bangsa Indonesia kunjungan Obama sangatlah tergantung bagaimana rakyat terutama pemerintah Indonesia menyikapi dan membuat sesuatu untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat. Kalau hanya sekedar ramai-ramai atau sekedar nostalgia, karena Obama pernah tinggal di Indonesia ya tidak ada manfaatnya. "Tapi kalau kita dapat menindaklanjuti berapa hal, sesuai dengan apa yang telah dibicarakan Presiden SBY dan Obama, saya kita banyak sekali manfaatnya," ujar Marwah.

Di bidang ekonomi misalnya, kata Marwah, pemerintah Indonesia harus berani minta kepada Obama agar kontrak kerja PT Freeport dan perusahaan tambang minyak milik AS harus dikaji ulang atau dibicarakan kembali. Karena, kontrak kerja tersebut dinilai sangat merugikan Indonesia. Kita harus berani mengatakan keinginan kita.

Bagaimana idealnya tambang emas dan minyak dikelola secara baik dan ideal, sehingga rakyat Indonesia tidak dalam posisi yang dirugikan. Karena, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 segala sumber, kekayaan alam Indonesia dikuasai negara kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan kontrak kerja dengan PT Freeport dan tambang minyak milik perusahaan AS, pemerintah Indonesia harus berani mengambil keputusan yang berpihak dan menguntungkan rakyat Indonesia. Pemerintahan dimana pun akan selalu mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu, tidak terkecuali AS. Indonesia pun harus begitu.

Kemudian dalam hal kerja sama bidang pertahanan dan keamanan, Marwah mengatakan keinginan pemerintah AS untuk menghibahkan pesawat F-16 sebaiknya diterima saja. Tapi dengan sebuah catatan bahwa AS tidak akan meng-

embargo suku cadangnya seperti pernah dilakukan beberapa tahun yang silam. "Kita sendiri yang menentukan bantuan itu dan akan kita pergunakan untuk apa. Tapi yang terpenting bantuan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar HAM," tandasnya.

Dalam kerjasama di bidang apa pun bangsa dan negara kita harus punya posisi tawar yang kuat. Selain itu kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kita harus melihat diri kita setara dengan negara mana pun, termasuk AS. Pemerintah Indonesia harus berani mengambil keputusan uang berpihak kepada rakyat.

Sedikit mengulas gaya Obama saat memberi mata kuliah umum di UI, Marwah mengatakan sangat bagus. Obama bukan tipe orang AS yang kapitalistik yang sangat menguntungkan pemodal, tapi Obama justru berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu bisa terlihat dari program-program yang dilaksanakannya. Obama juga sangat menaruh perhatian kepada





keadilan dan kemajemukan dan tipe pemimpin yang berani mengambil keputusan pelik beresiko yang sangat memungkinkan bisa menghilangkan popularitasnya. Sebuah keberanian yang tidak dimiliki oleh pemimpin kita.

Menurut Marwah tawaran Obama untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, misalnya saling tukar pelajar dan mahasiswa harus ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan nasional. Kalau tidak, ya percuma, akan lewat begitu saja. Demikian juga pesan Obama yang terkait dengan kerukunan hidup beragama, percuma saja kalau tak ada kelanjutannya. "Bola sekarang ada di tangan kita, bukan di tangan Obama!"

BEDA PENDAPAT

Tapi menurut pakar hukum Dr Dimiyati Hartono, kehadiran Presiden AS Obama tidak ada yang bermanfaat secara langsung bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Tapi kalau toh mau dicaricari, manfaatnya adalah "ada orang asing kebetulan dia seorang Presiden AS berbicara tentang dasar negara kita, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti Presiden Obama tahu dan mengakui bahwa Indonesia bukan negara kapitalisme,

imperialisme dan kolonialisme'. "Itu saja manfaatnya, selain itu tidak ada," ujar Dimiyati Hartono.

Menyinggung masalah kerjasama di bidang pendidikan, Dimiyati menegaskan pelajar atau mahasiswa Indonesia yang akan belajar ke luar negeri mana pun, tidak hanya ke AS, harus tahu tujuannya. Tujuannya adalah menimba ilmu, kemudian ilmu itu dikembangkan dan diabdikan untuk membangun bangsa dan negaranya.

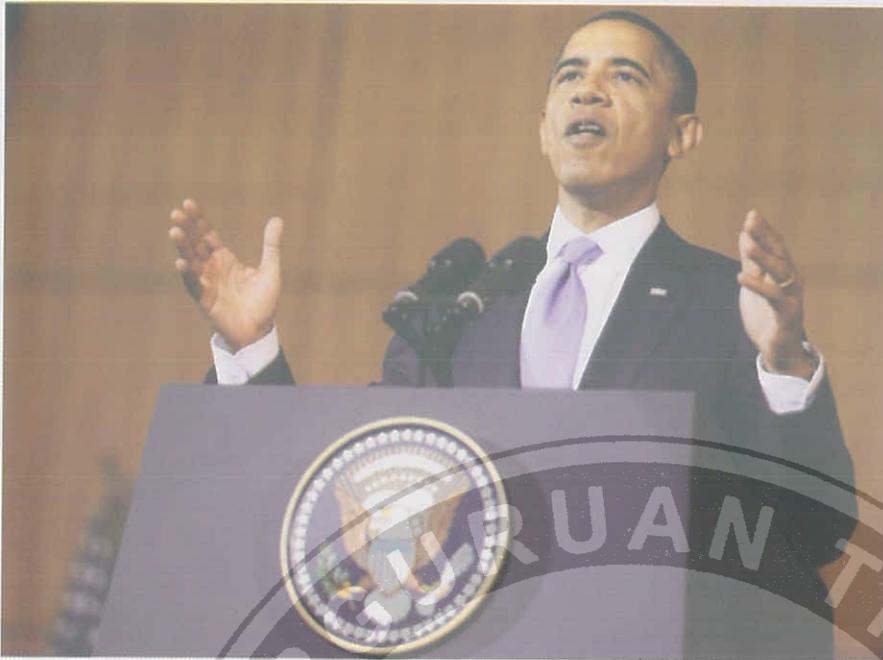
Dimiyati juga mengatakan pelajar atau mahasiswa yang akan belajar ke luar negeri harus punya bekal dasar, yaitu mengerti prinsip dasar negara ini. Ia harus mengerti Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita nasionalnya. Dan itu semua akan tercermin dan melekat dalam dirinya di manapun mereka berada. Jadi bukan mewujudkan cita-cita negara dimana mereka menimba ilmu.

Dalam kaitan ini, lanjutnya, kita harus tahu, negara asing mana pun, termasuk AS, walau mereka memuji dan menanjung dengan kata-kata manis tidak akan pernah mencintai bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa di luar bangsa Indonesia yang betul-betul mencintai Indonesia. Keyakinan itu harus betul-betul dipegang karena sesungguhnya mereka hanya mencintai

kepentingan bangsanya sendiri yang berada di Indonesia. Selama Indonesia masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya mereka, mereka akan tetap bermanis-manis kepada Indonesia. Itu hanya gaya untuk mencari simpati agar kepentingan nasional mereka dapat terakomodasi di Indonesia.

Tentang kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan (AS akan menghibahkan pesawat F-16) Dimiyati mengatakan sebaiknya hibah diterima saja. Tapi Indonesia jangan mau didekte penggunaannya. Kita jangan mau menerima bantuan dengan batasan tidak boleh untuk ini dan tidak boleh untuk itu. Prinsipnya penggunaan bantuan apa pun menjadi tanggungjawab sepenuhnya bangsa Indonesia. Bantuan peralatan militer tentunya akan kita gunakan untuk mempertahankan kedaulatan kita dari gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tentang kerjasama di bidang ekonomi terutama yang terkait kontrak kerja dengan PT Freeport dan beberapa perusahaan tambang minyak AS yang beroperasi yang dirasakan merugikan bangsa Indonesia, Dimiyati mengatakan sebaiknya dikaji ulang. Karena, hal ini tidak dapat dilepaskan dengan



pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan ekonomi yang menyangkut kesejahteraan rakyat dulu dinamakan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila.

Dalam kaitan ini kita dapat mencontoh Cina. Cina itu negara maju, tetapi BUMN-nya tetap dibesarkan dan dijaga. Setiap negara atau pengusaha yang ingin kerjasama dengan Cina dalam hal yang strategis seperti misalnya yang menyangkut transportasi, energy, dan telekomunikasi diwajibkan kerjasama dengan BUMN Cina. Sementara di Indonesia tidak, BUMN-nya malah dijual. Bayangkan BUMN yang untung dan strategis yaitu PT Indosat dijual. Ini karena kita tidak cerdas, dalam arti, sebenarnya dalam jaman Orde Baru itu yang salah itu apanya, konsepsinya atau implementasinya. Kalau yang salah implementasinya yang diperbaiki implementasinya, bukan konsepsinya. Kita ini tidak cerdas karena ditutup dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akhirnya konsepsinya dirusak tidak karuan.

AS akan selalu menjalankan prinsip bernegara yang berbasis kapitalisme dan imperialisme. AS akan menggunakan senjata ekonominya untuk menguasai suatu negara, termasuk Indonesia.

Kalau dulu imperialisme menguasai suatu negara dengan kekerasan, sekarang dengan cara halus, bukan dengan kekerasan tetapi dengan otak. AS akan membiarkan siapa pun yang menjadi Presiden Indonesia (sekarang SBY), yang penting Presiden Indonesia siapapun namanya menjalankan konsep negara AS. Karena itu, tidak mengherankan jika Presiden Obama waktu datang ke Indonesia 9 November 2010 lalu memuji-muji SBY dan Indonesia. Sementara kita saat ini tidak sadar dinabobokan untuk menerima konsep AS. Inilah yang kita sebut neokapitalisme, neo imperialisme, dan neokolonialisme.

"Soal PT Freeport mana berani kita menyinggungnya, karena kita tidak punya pegangan yang kuat dan jelas. Pancasila sudah diabrak-abrik dengan beberapa kali amandemen. Sekarang pun Pancasila sudah jarang disebut dan mulai dilupakan," ujar Dimiyati.

"Kita masih ingat, bagaimana mungkin ada rapat dinas resmi di lembaga DPR dan dihadiri Presiden SBY, tapi lagu Kebangsaan Indonesia Raya lupa dinyanyikan. Ini sungguh keterlaluan," ujar Dimiyati lagi.

Menjawab pertanyaan tentang kuliah umum Presiden Obama di Universitas yang mendapat sambutan yang luar biasa, Dimiyati mengatakan gaya dan isi pidato Obama memang bagus. Di sisi yang lain selama ini kita melihat

ngomongnya pemimpin kita plintat-plintut, muter-muter tanpa akhir. Obama berbicara sangat lantang, lugas dan sasarannya jelas terlihat. Dengan demikian di mata mahasiswa he is the leader. Walaupun leader negara lain. Namun di sisi lain memang ada rasa rendah diri atau minder yang ditanamkan untuk menghancurkan rasa nasionalisme kita. Buktinya kita lebih cepat menghargai orang asing daripada bangsanya sendiri. Sekarang kita kagum terhadap Nelson Mandela. Di televisi dan radio, Mandela dipuja dan diberitakan sangat hebat.

Padahal kalau kita ukur, apa yang dilakukan Mandela dengan apa yang dilakukan Bung Karno pada tingkat nasional dan internasional, tidak ada bandingannya. Mandela itu cuma soal apartheid di negaranya sendiri, Afrika, negara kecil. Sedangkan Bung Karno secara nasional dengan penduduk sekitar 100 juta jiwa waktu itu dengan Bhenika Tunggal Ika tanpa persoalan seperti apartheid dapat dipersatukan. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian di tingkat internasional, apa peran Mandela. Sedang Bung Karno dapat melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Amerika Latin sampai The New Emerging Forces. Tapi kita ini tak ada yang mengingat dan menghargai kehebatan Bung Karno itu. Padahal ini pemikiran-pemikiran besar.

Ingat Bung Karno tahun 1960 an sudah mengatakan bahwa Manifesto Komunis itu sudah menjadi bagian sejarah dan terbukti 1980 an hancur. Bung Karno juga sudah mengatakan bahwa kapitalisme itu juga akan menjadi bagian sejarah dan ternyata tahun 1998 dan 2008 dengan bilt out krisis global, mereka sudah mengakui sendiri bahwa kapitalisme sudah mulai Senjakalaning Majapahit. Kapatalisme sudah mulai menurun dan akan segera hancur tapi kita tak menyadarinya.

"Kita sudah diberi Pancasila yang hebat, tapi kita masih menoleh kanan-kiri milik orang lain. Istilahnya hujan emas di negara lain hujan batu di negeri sendiri. Maka dimaki-maki hujan batu. Padahal batu kalau diolah sangat berguna," tandas Dimiyati. 0 soe



Selamat & Sukses

**ATAS PELAKSANAAN PELANTIKAN PERWIRA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2010**

OLEH:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

16 DESEMBER 2010

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

STRIVING FOR EXCELLENCE

KASUBDIT II DITIPID NARKOBA BARESKRIM POLRI

**KOMBES POL DRS. SISWANDI &
KELUARGA**



Pembekalan Ilmu Narkoba Bagi Detasemen 44 Akpol

Peredaran gelap narkoba dikelola oleh organisasi yang sangat rapi, didukung dana yang tidak terbatas, dilengkapi sarana teknologi canggih, dijalankan oleh tenaga profesional lengkap dengan kaki tangan berjumlah besar serta tersebar luas.

DEMIKIAN penjelasan Kasubdit Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri KBP Siswandi ketika memberi pembekalan bagi 72 orang Taruna Akpol Datasemen 44 yang terdiri dari lulusan S1 dan S2 di Kampus Akpol, Semarang, Kamis (4/11) lalu.



Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP. Drs. Siswandi saat memberikan materi paparan kepada Taruna Akpol Detasemen 44

Pembekalan bertema "Trend Kejahatan Narkoba di Indonesia" tersebut meliputi materi Struktur organisasi Bareskrim Polri & Dittipid Narkoba, Situasi Tindak

Pidana Narkoba 5 tahun terakhir, Landasan Yuridis, Tehnik lidik dan pengungkapannya (kasusitis), Modus operandi, Jaringan sindikat narkoba dalam dan luar negeri, MoU Instansi terkait dan Bilateral, Target pemerintah Indonesia bebas narkoba th. 2015.

Pembekalan itu diberikan dalam rangka persiapan para taruna untuk menghadapi penugasan mereka di wilayah perbatasan, yang merupakan jalur potensial sebagai lalulintas keluar masuknya narkoba. Untuk itu Kombes Siswandi berpesan agar mereka siap bertindak ketika menemukan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

"Jangan ragu bertindak," tegas Kombes Siswandi seraya menambahkan penyalahgunaan



Taruna Akpol Datasemen 44, saat bertanya kepada Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP. Drs. Siswandi dalam acara tanya jawab